

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

8. Lembaga.....

8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPPL Radio adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio.

BAB II

BENTUK DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL Radio.
- (2) LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama “SWARA PERINTIS KOTA SUKABUMI”.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3

LPPL Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 4.....

Pasal 4

LPPL Radio mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan LPPL Radio bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah, regional, dan nasional.

BAB IV

PENGURUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengurus LPPL Radio terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio tetap berorientasi pada publik;
- c. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio.

Paragraf 3

Syarat

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan.....

- d. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- j. bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak.....

- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang proses pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Wali Kota, rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Anggot Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Direksi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Direksi dijabat oleh pejabat struktural pada Dinas.

Paragraf 2

Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Direksi dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direksi tidak diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 15

Dewan Direksi bertugas:

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

f. membuat.....

- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio di dalam dan di luar pengadilan;
- h. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat di Daerah; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Dewan Direksi berwenang:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio dan operasional penyiaran;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Syarat

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa.....

- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- j. bukan merupakan anggota partai politik.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap; atau
- d. masa jabatan berakhir.

(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio;

c. dipidana.....

- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang proses pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung, anggota Dewan Direksi dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi, proses pemberhentian dihentikan.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.

(9) Jika.....

- (9) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.
- (10) Apabila terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Direksi, dan belum dilaksanakan pengangkatan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Dewan Pengawas menunjuk salah satu pegawai senior yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas anggota Dewan Direksi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada LPPL Radio bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPPL Radio.
- (2) Pegawai pada LPPL Radio diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan LPPL Radio.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS atau non PNS di lingkungan Dinas.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Radio; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran LPPL Radio diawasi oleh komisi penyiaran dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) LPPL Radio wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 23.....

Pasal 23

Laporan tahunan LPPL Radio ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 24

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan penyiaran dan lembaga yang ada masih tetap menjalankan tugas sampai dengan dikeluarkannya izin tetap penyiaran LPPL Radio.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur mengenai lembaga penyiaran lokal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Februari 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Februari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT: 1/27/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



REN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

I. UMUM

Keberadaan radio sebagai media penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan khususnya di Kota Sukabumi.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio.

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio diperlukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi berfungsi sebagai identitas lokal, pemersatu, dan pembentuk citra positif Kota Sukabumi di kancah regional maupun nasional, selain juga bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan Untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nama SWARA PERINTIS terdiri dari 2 (dua) suku kata, swara bersal dari bahasa sansekerta yang berarti suara sedangkan kata perintis memiliki beberapa makna. Pertama, dalam sejarah dunia radio di Kota Sukabumi LPPL Swara Perintis adalah sebagai radio pertama atau sebagai perintis lahirnya radio siaran di Kota Sukabumi.

Sejarah dimulainya pada Tahun 1960 dengan munculnya ide dari putra asli Kota Sukabumi Ir. WIYONO KARTA WIGENA yang mengadakan eksperimen radio broadcasting yang setelah on air mendapat sambutan yang luar bias dari warga masyarakat Kota Sukabumi, karena selain menyajikan materi acara pemberitaan, juga sajian hiburan lagu-lagu yang diputar pada piringan hitam. Untuk memudahkan masyarakat mengenal radio tersebut, maka diberi nama radio Eksperimental Sukabumi.

Dengan semakin dikenalnya nama Radio Eksperimental Sukabumi, maka lokasi yang semula bertempat di rumah Ir. WIYONO KARTA WIGENA, dipindahkan ke jalan Gunung Gede Nomor 4 dengan nama baru yaitu Persiapan RRI Sukabumi yang di kelola secara terpadu oleh Komres 823, Kodim 0607, dan Deppen Sukabumi. Tidak lama setelah itu lalu berpindah kembali ke Kantor Polres Sukabumi di Jalan Perintis Kemerdekaan dengn ruang siar sederhana dan alat peredamnya menggunakan karung goni.

Setelah 8 tahun berdiri, RRI Persiapan Sukabumi semakin dikenal oleh Masyarakat Kota Sukabumi, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 201/Humas/1968 dikukuhkan menjadi Radio Daerah Sukabumi dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 4.

Pada.....

Pada tanggal 11 September 1969 bertepatan dengan Hari Radio Nasional, radio RRI Persiapan Sukabumi diresmikan oleh Walikota Sukabumi SALEH WIRADIKARTA, S.H., dan tanggal tersebut kemudian dikukuhkan sebagai Hari Jadi RSPD Kota Sukabumi.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15.....

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.